

- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm 295.
- Johnstone, Richard dan Rick Sarre. 2004. *Regulation : Enforcement and Compliance*. AIC Research and Public Policy Series. Australian Institute of Criminology.
- Kurnia, Titon Slamet. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : PT Alumni.
- Maloney WA. 2001. *Regulation in an episodic policy-making environment: the water industry in England and Wales*. *Public Administration* 79(3): 625–642
- Mufiz, Ali. 2014. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Nazir, Mohammad. 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Randall DM & Baker DD 1994. *The threat of legal liability and managerial decision making: regulation of reproductive health in the workplace in S Sitkin & R Beis (eds) The legalistic organization*. Sage: Thousand Oaks: 169–189
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 12.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 13-14.
- Soeprapto, Maria Farida I. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius.

- Adhayanto, Oksep dan Yudhanto Satyagraha Adiputra. 2015. *Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan di Bidang Kelautan dan Pertambangan)*. Jurnal Selat, Mei, Volume 2, No 2 Edisi 4.
- Bennett P. 2000. *Anti-trust? European Competition Law And Mutual Environmental Insurance*. *Economic geography* 76:1:50–67
- Cocklin C & Wall M.1997. *Contested rural futures: New Zealand's east coast forestry project*. *Journal of rural studies* 13(2): 149–162
- Damayanti, Sella Nova. 2017. *Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 5 Nomor 3 September – Desember 2017.
- Daniels N 2003. *Chevron V Echazabal: Protection, Opportunity And Paternalism*. *American Journal Of Public Health* 93(4): 545–548
- Huda, Ni'matul. 2006. *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*. *Jurnal Hukum* No 1 Vol 13 Januari 2006.
- Lailam, Tanto. 2014. *Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-undang*. *Jurnal Konstitusi* Volume 11 Nomor 1 Maret 2014. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhlizi, A. Faiz. 2017. *Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 6 Nomor 3 Desember 2017. Jakarta : Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Towards a Combined Code on Corporate Governance in Nigeria. Journal Bus Ethics. Springer Science and Business.

Pratama, I. B. Gede Wahyu dan I Ketut Suardita. 2015. *Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara Volume 03 Nomor 02 Mei 2015. Riyaningtyas, Dyah Puspita. 2010. *Studi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.* Surakarta : Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.

Sidik, Suyanto. 2013. *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat.* Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013.

Simarmata, Rikardo dan Asep Yunan Firdaus. 2016. *Pemberlakuan UU No. 23/2014 dan Desentralisasi di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.* Jakarta : Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

Steni. Bernadinus. 2016. *Membedah UU Pemerintahan Daerah Yang Baru : Apa yang Baru dalam Pembagian Urusan dan Kewenangan Pusat-Daerah di Bidang Sumber Daya Alam?* Jakarta : Institut Penelitian Inovasi Bumi

Watters F 2003. *The devil is the details: the deregulation of an essential service.* Unpublished PhD thesis University of Melbourne.

Yudha, Alda Kartika. 2017. *Hukum Islam dan Hukum Positif : Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama.* Jurnal Hukum Novelty, Volume 8 No 2, Agustus 2017, hlm152-172

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum
PADJAJARAN, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

DOKUMEN PEMERINTAH

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005. *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2011. *Penataan Peraturan Perundang-undangan*. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.

Sutikno et all. 2010. *Kajian Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Basis Kas menuju Akrual)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Basis Akrual Penuh)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21

Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang

Pemberian izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Industri Olahraga Nasional

Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik bahwa pengelolaan tenaga listrik dari Tenaga Air

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 70

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip

Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



**PEMETAAN REGULASI DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR KALI
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Ketenagalistrikan.

Peraturan Daerah DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan dan Kartu Identitas Anak

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016-2035

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi Kewenangan DIY

Peraturan Daerah DIY Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan

Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Keolahragaan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah

Pemerintahan Daerah

INTERNET

Analisa Daily. 2016. *Pengalihan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Efektif 2017*.

[http://harian.analisadaily.com/kota/news/pengalihan-pegawai-pengawas-](http://harian.analisadaily.com/kota/news/pengalihan-pegawai-pengawas-ketenagakerjaan-efektif-2017/261388/2016/09/06)

[ketenagakerjaan-efektif-2017/261388/2016/09/06](http://harian.analisadaily.com/kota/news/pengalihan-pegawai-pengawas-ketenagakerjaan-efektif-2017/261388/2016/09/06) Akses tanggal 14 Agustus 2018

Bangka Pos. 2017. *Kisruh IPR, 19.000 Hektare Jadi Tambang*.

[http://bangka.tribunnews.com/2017/10/31/kisruh-ipr-19000-hektare-jadi-](http://bangka.tribunnews.com/2017/10/31/kisruh-ipr-19000-hektare-jadi-tambang?page=all)

[tambang?page=all](http://bangka.tribunnews.com/2017/10/31/kisruh-ipr-19000-hektare-jadi-tambang?page=all). Akses tanggal 10 Agustus 2018.

Bengkulu Ekspres. 2015. *Kewenangan Kelola Pertambangan Hilang*.

<http://bengkuluexpress.com/kewenangan-kelola-pertambangan-hilang/> Akses

tanggal 20 Juni 2018.

Chandra, Wahyu. 2017. *Kewenangan Ditarik ke Provinsi, Efektivitas Pengawasan di Laut*

Diragukan. [http://www.mongabay.co.id/2017/02/28/kewenangan-ditarik-ke-](http://www.mongabay.co.id/2017/02/28/kewenangan-ditarik-ke-provinsi-efektivitas-pengawasan-di-laut-diragukan)

[provinsi-efektivitas-pengawasan-di-laut-diragukan](http://www.mongabay.co.id/2017/02/28/kewenangan-ditarik-ke-provinsi-efektivitas-pengawasan-di-laut-diragukan). Akses tanggal 12 Agustus

2018

Djajono, Ali. 2017. *Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca UU No, 23 Tahun 2014 tentang*

Pemerintahan Daerah. Majalah Agro

Indonesia. [http://agroindonesia.co.id/2017/12/kesatuan-pengelolaan-hutan-pasca-](http://agroindonesia.co.id/2017/12/kesatuan-pengelolaan-hutan-pasca-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/)

[uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/](http://agroindonesia.co.id/2017/12/kesatuan-pengelolaan-hutan-pasca-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/). Akses tanggal 9 Agustus

2018

Dunia Energi. 2016. *Maksimalkan Pengawasan, Pemerintah Tambah Inspektur Tambang*.

[http://www.dunia-energi.com/maksimalkan-pengawasan-pemerintah-tambah-](http://www.dunia-energi.com/maksimalkan-pengawasan-pemerintah-tambah-inspektur-tambang/)

[inspektur-tambang/](http://www.dunia-energi.com/maksimalkan-pengawasan-pemerintah-tambah-inspektur-tambang/). Akses tanggal 12 Agustus 2018

<http://ebebun.blogspot.co.id/2015/04/menyoal-implikasi-uu-23-tahun-2014.html>

Akses tanggal 20 Juni 2018.

Erlangga, Doni. 2016. *Mulai Oktober 2016, Perizinan Pertambangan Dialihkan ke Provinsi.* Eiti Indonesia <http://eiti.ekon.go.id/mulai-oktober-2016-perizinan-pertambangan-dialihkan-ke-provinsi/> Akses tanggal 10 Agustus 2018.

Harian Haluan. 2016. *Alih Kewenangan SMA/SMK dan Kualitas Pendidikan.* <https://www.harianhaluan.com/news/detail/50078/alih-kewenangan-smasmk-dan-kualitas-pendidikan> Akses tanggal 12 Agustus 2018

Haryata, Ruruh.. 2018. *Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan.* Badan Lingkungan Hidup DIY <https://blh.jogjaprov.go.id/detailpost/peran-serta-masyarakat-dalam-penegakan-hukum-lingkungan> Akses tanggal 14 Agustus 2018

Ipkani Purbalingga, 2016. *Dimanakah Rumah Penyuluh Perikanan Paska Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014?* <http://www.ipkanipurbalingga.or.id/2016/08/dimanakah-rumah-penyuluh-perikanan.html>. Akses tanggal 24 April 2017.

Jaga Riau. 2018. *Izin Usaha Niaga Bahan Bakar nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.* <https://jaga.riau.go.id/perizinan/detail/105/izin-usaha-niaga-bahan-bakar-nabati-biofuel-sebagai-bahan-bakar-lain-dengan-kapasitas-penyediaan-sampai-dengan-10000-sepuluh-ribu-ton-per-tahun>. Akses tanggal 12 Agustus 2018

Jenerio, Rio. 2018. *Pedoman Perizinan Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Lain Operasi Bidang Ketenagalistrikan.* <http://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pedoman->

ketenagalistrikan Akses tanggal 12 Agustus 2018

Kaltim Prokal. 2015. *Listrik Kebutuhan Terpenting, Sidang Kelima Uji Materiil UU*
23/2014. <http://kaltim.prokal.co/read/news/246123listrikkebutuhanterpenting>.

Akses tanggal 26 April 2017.

Kedaulatan Rakyat Jogja. 2017. Pengawas Ketenagakerjaan Ditangani Provinsi.

http://krjogja.com/web/news/read/32830/Pengawas_Ketenagakerjaan_Ditangani_

Provinsi Akses tanggal 14 Agustus 2018

Klik Legal. 2017. *Kementerian ESDM Akan Terus Melakukan Pengawasan Usaha*

Pertambangan. [http://kliklegal.com/kementerian-esdm-akan-terus-melakukan-](http://kliklegal.com/kementerian-esdm-akan-terus-melakukan-pengawasan-usaha-pertambangan/)

[pengawasan-usaha-pertambangan/](http://kliklegal.com/kementerian-esdm-akan-terus-melakukan-pengawasan-usaha-pertambangan/) Akses tanggal 12 Agustus 2018.

Kontan. 2014. *Bupati Tak Berwenang Lagi keluarkan IUP.*

<https://industri.kontan.co.id/news/bupati-tak-berwenang-lagi-keluarkan-iup>

Akses tanggal 25 April 2017.

Mahkamah Konstitusi . 2017. *Pemerintah : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen*

Kewenangan

Pemprov.<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id>

[=13621#.WcxMkcgjGM8](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id) Akses tanggal 5 Juni 2018.

Muhtada, Dani. 2016. Sumber Pendapatan Daerah..

<http://blog.unnes.ac.id/muhtada/2016/03/11/sumber-pendapatan-daerah/> Akses

tanggal 12 Agustus 2018.

Pacific Pos. 2016. Kabupaten Tak Punya Kewenangan Pengelolaan dan Pengawasan

Hutan.[https://www.pacificpos.com/item/9657-kabupaten-tak-punya-kewenangan-](https://www.pacificpos.com/item/9657-kabupaten-tak-punya-kewenangan-pengelolaan-dan-pengawasan-hutan)

[pengelolaan-dan-pengawasan-hutan.](https://www.pacificpos.com/item/9657-kabupaten-tak-punya-kewenangan-pengelolaan-dan-pengawasan-hutan) Akses tanggal 9 Agustus 2018

Provinsi. <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/08/02/336775/kewibawaan-bupati-hilang-ditariknya-kewenangan-pemkab-ke-propinsi>. Akses tanggal 25 April 2017.

Portal Berita Editor. 2017. *Pengelolaan Inspektur Tambang, Kewenangan Pemerintah Pusat.* <http://www.portalberitaeditor.com/pengelolaan-inspektur-tambang-kewenangan-pemerintah-pusat/>. Akses tanggal 10 April 2017.

Purba, T. Pandapotan. 2018. *Gaduh Kewenangan di Kawasan Permukiman.* Media Tata Ruang <http://mediatataruang.com/gaduh-kewenangan-di-kawasan-permukiman/> Akses tanggal 14 Agustus 2018

Radio Edukasi. 2016. *Pendidikan Menengah DIY Dilimpahkan ke Dikpora.* <http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/1266/pendidikan-menengah-di-diy-dilimpahkan-ke-dikpora.html> Akses tanggal 12 Agustus 2018

Reportase Indonesia, 2016. *Pasca Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Nasib Penyuluh di Persimpangan Jalan.* <http://reportaseindonesia.net/pascauuno23-tahun2014/> Akses tanggal 25 April 2017.

RMOL Babel. 2017. *IPR Akan Dikonsultasikan ke Menteri Jonan.* <http://www.rmolbabel.com/read/2017/11/04/3989/IPR-Akan-Dikonsultasikan-Ke-Menteri-Jonan-> Akses tanggal 12 Agustus 2018.

Ruru, Niko. 2018. *Terbentur Aturan Teknis, DBH DR Mengendap Sekitar Rp 170 Miliar.* <http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/29/terbentur-aturan-teknis-dbh-dr-mengendap-sekitar-rp170-miliar> . Akses tanggal 9 Agustus 2018

Soda, Egenius. 2016. *Kementerian ESDM Perkuat Pengelolaan Inspektur Tambang.* <https://www.tambang.co.id/tata-kelola-pertambangan-kesdm-perkuat-pengelolaan-inspektur-tambang-12884/>. Akses tanggal 10 April 2017.

<http://agroindonesia.co.id/2015/10/membaca-keresahan-penyuluh/>. Akses tanggal

25 April 2017

Yazid, Muhammad. 2014. *Kepala Daerah Tak Boleh Keluarkan Izin Tambang*.

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/17/kepala-daerah-tak-boleh->

[keluarkan-izin-tambang](http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/17/kepala-daerah-tak-boleh-keluarkan-izin-tambang). Akses tanggal 12 Agustus 2018

Zulvina, Susi. 2014. *Disharmoni Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-*

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terkait dengan

Penyelesaian Sengketa. <http://www.pknstan.ac.id/article/disharmoni-uu->

[pengadilan-pajak-dan-uu-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-terkait-](http://www.pknstan.ac.id/article/disharmoni-uu-pengadilan-pajak-dan-uu-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-terkait-)

[denganPajak](http://www.pknstan.ac.id/article/disharmoni-uu-pengadilan-pajak-dan-uu-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-terkait-denganPajak). Akses tanggal 24 April 2017